

KLIPING

12

Metropolitan

e-mail: desk.regional@kompas.id

KOMPAS, KAMIS, 27 OKTOBER 2022

Baca artikel lainnya seperti Nusantera di Kompas.id dengan memindai QR Code.

► klik.kompas.id/nusantera



Isu Dana Hambat Atasi Kemiskinan

Masih banyak keluarga miskin yang belum menerima bantuan sosial. Penghematan anggaran perlu dilakukan agar dapat dialokasikan untuk memaksimalkan penanggulangan kemiskinan di DKI Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyaluran bantuan sosial atau bansos kepada kelompok rentan hingga kini belum menyentuh seluruh penduduk miskin di Jakarta. Bansos yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terbatas oleh kuota dan anggaran yang tersedia.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta terus meningkat setiap tahun. Mulai dari 365.550 jiwa pada 2019 menjadi 480.860 jiwa pada 2020, kemudian sebanyak 501.920 jiwa pada 2021.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) DKI Jakarta Puspita Yunita, program perlindungan sosial yang berjalan belum berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin. Pemprov DKI dinilai perlu memperluas cakupan penerima bansos.

"Bantuan sosial seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) masih banyak yang belum diterima keluarga miskin yang berhak," ucapnya. Rabu (26/10/2022).

Saat akan silaturahmi warga miskin dengan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di depan Kantor Gubernur DKI, ada tiga tuntutan utama reformasi perlindungan sosial untuk rakyat miskin Jakarta. Ketipanya adalah memperluas cakupan penerima bansos, pelibatan warga miskin da-

lam kebijakan penanggulangan kemiskinan, serta menindaklanjuti perihal 1.728 warga yang dinilai berhak tetapi belum mendapat bansos.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta Ika Yuli Rahayu mengakui, belum semua warga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menerima bantuan. Hal ini karena keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI untuk dinas sosial, khususnya bagian bansos kesejahteraan sosial.

"Meskipun begitu, total penerima akan diusahakan meningkat setiap tahunnya. Perombakan data terus dilakukan setiap tiga bulan. Penerima yang sudah meninggal, berpindah domisili, dan tidak memenuhi syarat akan diganti dengan warga yang lebih layak menerima," ujarnya.

Berdasarkan data Dinas Sosial DKI, total penerima KLJ 104.448 orang, KPDJ 14.230 orang, dan KAJ 10.553 orang. Penerima KLJ mendapat bantuan Rp 600.000 per bulan, sedangkan KPDJ dan KAJ menerima Rp 300.000 per bulan.

Total anggaran tahun 2022 untuk bansos kesejahteraan sosial Rp 5,19 triliun. Jumlah itu setara 6,2 persen dari total APBD DKI tahun ini yang berjumlah Rp 82,47 triliun.

"APBD DKI Jakarta (tahun 2022) tidak akan ada perubahan. Anggaran program yang darurat dan mendesak akan dimasukkan dalam anggaran satuan kerja perangkat daerah

(SKPD) sehingga tidak ada APBD Perubahan 2022," ucap Heru Budi Hartono.

Meskipun demikian, usulan APBD DKI Jakarta 2023 sedang dibahas dan masih tahap pembahasan poin-poin. Menurut dia, permasalahan DKI yang lainnya akan dikoordinasikan pada dinas-dinas terkait.

Penghematan

Secara terpisah, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian, mengatakan, tahun depan akan dilakukan penghematan anggaran agar dapat dialokasikan pada upaya penanggulangan kemiskinan. Hal itu dinilai perlu untuk memperbesar kapasitas penerima bansos. "Namun, hal itu juga bergantung pada realisasi pendapatan asli daerah tahun depan. Penghematan tersebut juga perlu pertimbangan jangka panjang," ucapnya.

Koordinator Advokasi Urban Poor Consortium (UPC) Gugun Muhammad mengatakan, bansos tunai tidak membantu mengatasi kemiskinan. Anggaran lebih baik dialihkan pada bantuan yang bersifat produktif, seperti koperasi atau usaha mikro, kecil, dan menengah.

Warga miskin juga perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan karena mereka memahami situasi dan kebutuhannya sendiri. "Keterlibatan warga miskin masih minim dalam pengambilan keputusan. Hanya lurah, ketua RT, ketua RW, dan tokoh masyarakat yang sering terlibat," ujarnya. (21)